

BAB I

PENDAHULUAN

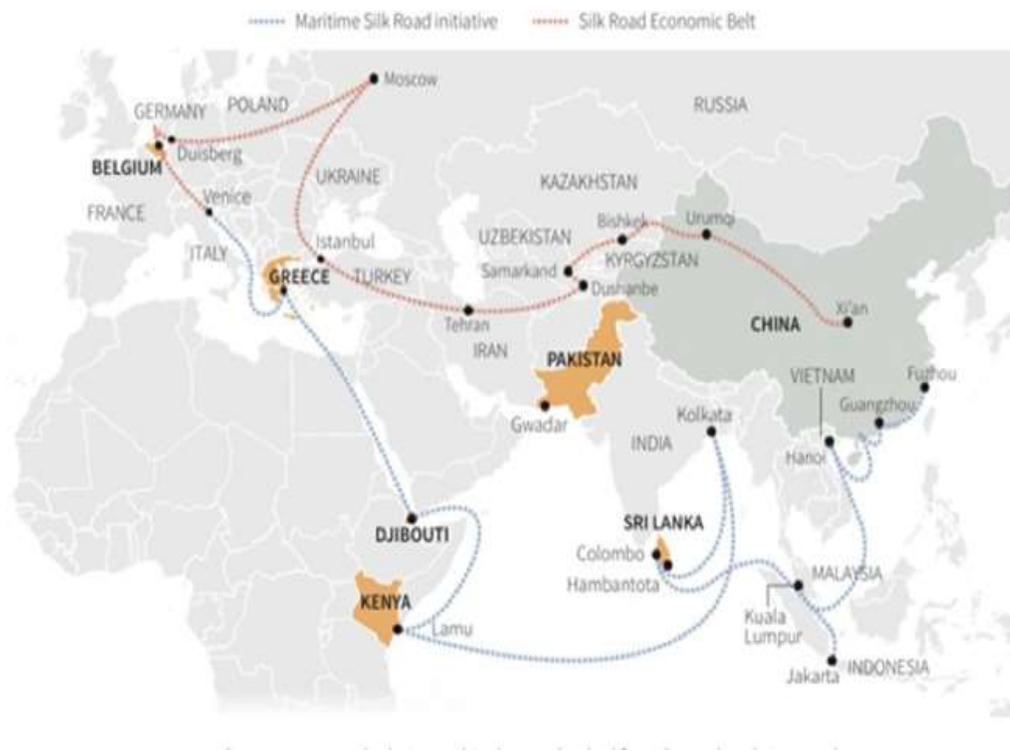
1. Latar Belakang Masalah

Setiap negara mempunyai kepentingan negara yang harus dicapai. Kepentingan nasional tersebut dapat juga dicapai didalam negeri maupun luar negeri. Untuk mencapaian kepentingan nasional luar negeri, alat yang digunakan adalah Politik Luar Negeri. Dalam pengambilan keputusan politik luar negeri di suatu negara sangat dipengaruhi oleh lingkungan regional maupun internasional. Hal ini terlihat pada Politik Luar Negeri Indonesia, dimana memiliki karakteristik dan gaya yang berbeda di setiap periode pemerintahan, saat periode Orde Lama, Politik Luar Negeri Indonesia memiliki karakteristik berhubungan akrab dengan kubu negara-negara komunis, serta bergaya Konfrontatif. Periode Orde Baru Politik Luar negeri Indonesia memiliki karakteristik berhubungan karib dengan kubu negara - negara Barat serta bergaya Low Profile-Kooperatif. Sedangkan pada periode Orde Reformasi Politik Luar Negeri Indonesia memiliki karakteristik berkawan dengan semua negara serta bergaya Aktif-Diplomatis Landasan idill Politik Luar Negeri Indonesia adalah Pancasila yang berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa yang ideal. (Windiani, 2010)

Hubungan antara Indnonesia dengan Cina telah dimulai dari 60 tahun yang lalu, beberapa sumber mengatakan terjalinya hubungan ini tidak lepas dari kebijakan luar negeri Indonesia yang beabs dan aktif. Tetapi pasca kejadian G30S tahun 1965, Presiden Soeharto memutus hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China. Pada tahun 1998 terjadi reformasi di Indonesia yang membawa kabar baik bagi hubungan diplomatik Indonesia-Cina, selanjutnya pada era kepemimpinan Megawati menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional, semakin membaiknya hubungan berlanjut pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimana kedua negara menjalin kerja sama pada

tahun 2004 dan tahun 2013. Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia yang ke tujuh membawa angin baru terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina, dalam era kepemimpinan beliau kerja sama yang terjalin . Pada 2019 yang lalu Cina dan Indonesia menjalin kerja sama dimana terdapat 23 proyek yang telah resmi ditandatangani, kemudian sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) ditandangi dengan skema *Business to Business (B-t-B)* oleh pebisnis dari kedua negara (Baskara, 2019). Kerja sama internasional menjadi titik terang bagi pemerintahan Presiden Jokowi, untuk membangun fasilitas dalam negeri. Dalam hal ini, tawaran pemerintah Cina dengan program OBOR tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur itu sebagai contoh adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan rampung pada tahun 2021. Selain infrastruktur transportasi darat, Presiden Jokowi juga ingin membangun infrastruktur maritim berupa “tol laut” dan pelabuhan. Pembangunan infrastruktur maritim tersebut bertujuan untuk memperlancar konektivitas antarpulau (Fahrizal, Yudilla, & Sundari, 2020).

Pada 1981-1983, pertumbuhan ekonomi Cina mencapai 9,6 persen per tahun. Di Shenzhen, misalnya, pertumbuhan ekonominya mencapai 75 persen setiap tahun selama 1981-1984. Istilah "Kecepatan Shenzhen" atau "Efisiensi Shenzhen" dilahirkan untuk merujuk pada standar peningkatan yang juga diikuti daerah-daerah lain. Deng memperkenalkan "Sosialisme dengan karakteristik Cina," yang merupakan kombinasi dari sosialisme dengan kebijakan ekonomi pragmatis yang menguntungkan untuk investasi dan aktif dalam perdagangan dunia. "Ideologi" ini kemudian terus dijalankan oleh penerus Deng, sampai sekarang di era Xi Jinping, dan menjadikan RRT sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia (Fransiskus Danang Radityo, 2019). Selama tahun pertama menjabat sebagai Presiden Cina, Xi Jinping mengeluarkan serangkaian kebijakan ekonomi yang ambisius. Salah satu inisiatif yang menarik perhatian dunia internasional adalah Belt and Road Initiative (BRI) pada tahun 2013. Pada tahun tersebut, Presiden Cina Xi Jinping mengumumkan rencana untuk membangun Jalur Ekonomi Jalur Sutera dan Jalur Sutera Maritim Abad 21. Program ini merupakan lanjutan dari proyek yang telah dilakukan ribuan tahun yang lalu yaitu membuka jalur perdagangan lintas benua (Samti Wira Wibawati, 2018).



Sumber: Reuters, 2017

Gambar 1. Peta *One Belt One Road* (OBOR)

Skala kolosal BRI digambarkan dengan cakupannya yang melewati 4,4 miliar orang dan produk domestik bruto kumulatif (PDB) sekitar US \$ 21 triliun. BRI terdiri dari 2 komponen utama yaitu the *Silk Road Economic Belt* dan the *21st Century Maritime Silk Road*. *Silk Road Economic Belt* sebagai jalur darat bertujuan menghubungkan provinsi tertinggal bagian barat Cina dengan Eropa melalui Asia Tengah, terdapat beberapa poin utama untuk membangun jalur tersebut yaitu : a). fasilitas perdagangan yang fokus terhadap penghapusan halangan dagang dan pengurangan pajak, b). komunikasi kebijakan yang mendorong kerja sama dibidang ekonomi, c). koneksi infrastruktur yang dengan koridor transportasi yang besar, d). kerja sama dibidang keuangan, e). *hubungan People-to-People*. Sedangkan the 21st Century Maritime Silk Road sebagai rute laut bertujuan menghubungkan provinsi pesisir China yang kaya dengan kawasan Asia Tenggara hingga Afrika melalui pelabuhan dan jalur kereta api (Sari, 2017). Dengan menghubungkan Cina dengan berbagai belahan dunia maka Xi Jinping memimpikan sebuah jalan sutera besi bagi Cina beserta kepentingannya. *One Belt One Road* (OBOR) merupakan inisiasi dari Cina untuk menghubungkan jalur perdagangan lintas negara dan benua, program ini adalah fenomena globalisasi yang bisa menembus batas-batas negara yang dilalui */borderless*. Program OBOR ini bertujuan untuk investasi infrastruktur,

material konstruksi, membangun jalur kereta api, jalan raya, dll (Dinata, 2020). Dalam inisiasi tersebut banyak negara-negara yang tertarik untuk menjalin kerja sama dengan Cina, hal ini disebabkan karena Cina memberikan dana yang cukup besar yaitu senilai US\$ 150 miliar. Kemudian cara yang digunakan adalah melakukan kerja sama dengan antar perusahaan di kedua negara tersebut (Yahsyi, 2019). Selain bertujuan untuk memperkuat sektor ekonomi, program OBOR juga memiliki tujuan jangka panjang di sektor non-ekonomi dimana Cina ingin memperkuat pamor Komunis dimata dunia (H, 2016).

2. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, dapat ditarik rumusan masalah “Mengapa Indonesia masuk ke dalam program One Belt One Road China?”

3. Kerangka Teoritik

Untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut, dibutuhkan metode analisa yang tepat. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teori dalam hubungan internasional, yang dapat membantu. Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu seperti teori kebijakan luar negeri, kepentingan nasional dan teori perspektif agar dapat menjelaskan secara jelas mengenai kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia, ketika membuat kebijakan luar negeri untuk masuk dalam program One Belt One Road China.

1.1 Kepentingan Nasional

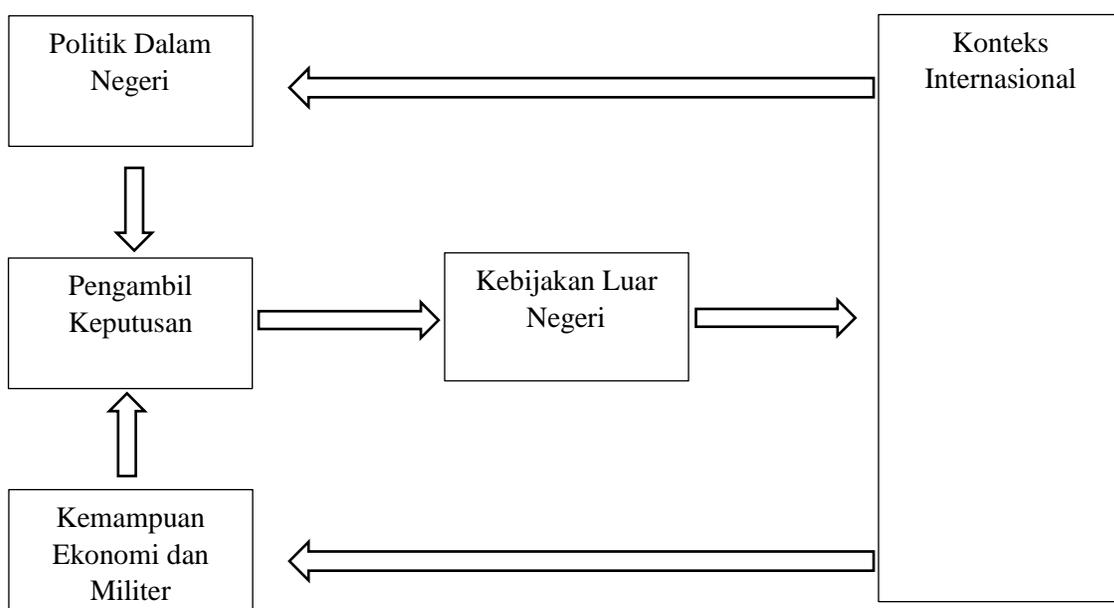
Kepentingan nasional, merupakan hal paling penting dalam sebuah negara untuk dapat menentukan arah kebijakan luar negeri yang akan dibuat negara tersebut. Para pakar hubungan internasional seperti Hans J. Morgenthau, mendefinisikan kepentingan nasional yaitu usaha suatu negara untuk dapat menjaga keberlangsungan hidup sebagai negara-bangsa, dengan cara pemenuhan kepentingan yang vital melalui kekuasaan (Power). Lebih dalam Morgenthau menjelaskan secara detail, bahwa ketika sebuah negara berada dalam politik internasional, maka negara harus memiliki tujuan yang terpenuhi. Tujuan yang terpenuhi tersebut, merupakan kepentingan nasional yang harus dicapai, jadi bukan mengejar kepentingan yang bersifat sub-nasional maupun supra-nasional (Mas'ood, 1990).

Berdasarkan teori tersebut, Indonesia memiliki beberapa kepentingan nasional yang ingin dicapai melalui program One Belt One Road Cina. Dalam jalur sutra tersebut, Indonesia ingin ikut serta dalam mengembangkan politik ekonominya secara regional, karena Indonesia sedang merasa bahwa masih tertinggal dalam infrastruktur, selain itu Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia. Dalam hal ketertinggalan infrastruktur, Indonesia berusaha untuk mewujudkan kepentingan tersebut, melalui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang bernama KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) (KCIC, 2021). Selain itu untuk dapat meningkatkan ekonomi berjangka panjang, maka Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia, kedua hal tersebut dirasa dapat dicapai dengan bergabung dalam proyek One Belt One Road China (Putra, 2019).

1.2 Kebijakan Luar Negeri

Sebuah negara pasti membuat kebijakan luar negeri untuk dapat memenuhi kepentingan nasional yang akan dicapai. Jadi untuk dapat menganalisa mengenai kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia, untuk bergabung dalam One Belt One Road yang digagas oleh Cina, digunakanlah teori kebijakan luar negeri dari William D. Coplin. Teori kebijakan luar negeri, digunakan untuk mengetahui alasan Indonesia bergabung dalam One Belt One Road.

William D. Coplin, menjelaskan teori kebijakan luar negeri dalam bukunya yang berjudul “Introduction to International Politics: A Theoretical Overview”. Coplin menjelaskan, mengenai bagaimana sebuah negara membuat atau merumuskan sebuah kebijakan luar negeri. Cara yang digunakan Coplin untuk menjelaskan sebuah negara membuat kebijakan luar negeri dengan menggunakan ilustrasi tabel (Coplin, 1971) seperti berikut :



a. Politik Dalam Negeri

Menurut William D. Coplin dalam bukunya, politik dalam negeri merupakan sebuah faktor yang melatarbelakangi sebuah kebijakan luar negeri. Faktor yang dimaksud oleh William D. Coplin yaitu pihak-pihak yang mempengaruhi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang akan diambil. Pihak-pihak yang dimaksud oleh William D. Coplin yaitu Partisan Influencer, Bureaucratic Influencer, Interest Influencer dan Mass Influencer (Coplin, 1971).

Dalam politik dalam negeri, pihak-pihak yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yaitu tentu saja masuk dalam Bureaucratic Influence. Bureaucratic Influence, merupakan individu atau kelompok dalam lembaga eksekutif, yang mana membantu seorang pembuat kebijakan ketika menyusun dan menjalankan kebijakan tersebut. Presiden Jokowi, pada beberapa kesempatan seperti pidato dan beberapa kampanye, sangat fokus terhadap investasi asing dan pembangunan infrastruktur (Coplin, 1971).

Hal tersebut dibuktikan dengan pidatonya dalam penyampaian visi Indonesia dalam acara Syukuran Nasional yang diadakan di Sentul Convention Center pada 14 Agustus 2019. Mengenai Investasi, Jokowi pernah mengatakan bahwa *“Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Karena dengan inilah lapangan kerja terbuka sebesar-besarnya,”* (Indonesia, 2019). Sedangkan mengenai infrastruktur, sebenarnya merupakan hal yang sudah dikampanyekan sejak pertama mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2014, pada kampanye periode kedua Jokowi mengatakannya lagi

“Tidak ada satu pun negara maju yang tidak mempunyai infrastruktur, tidak ada negara maju yang tidak memiliki SDM yang berkualitas” (Antara, 2019).

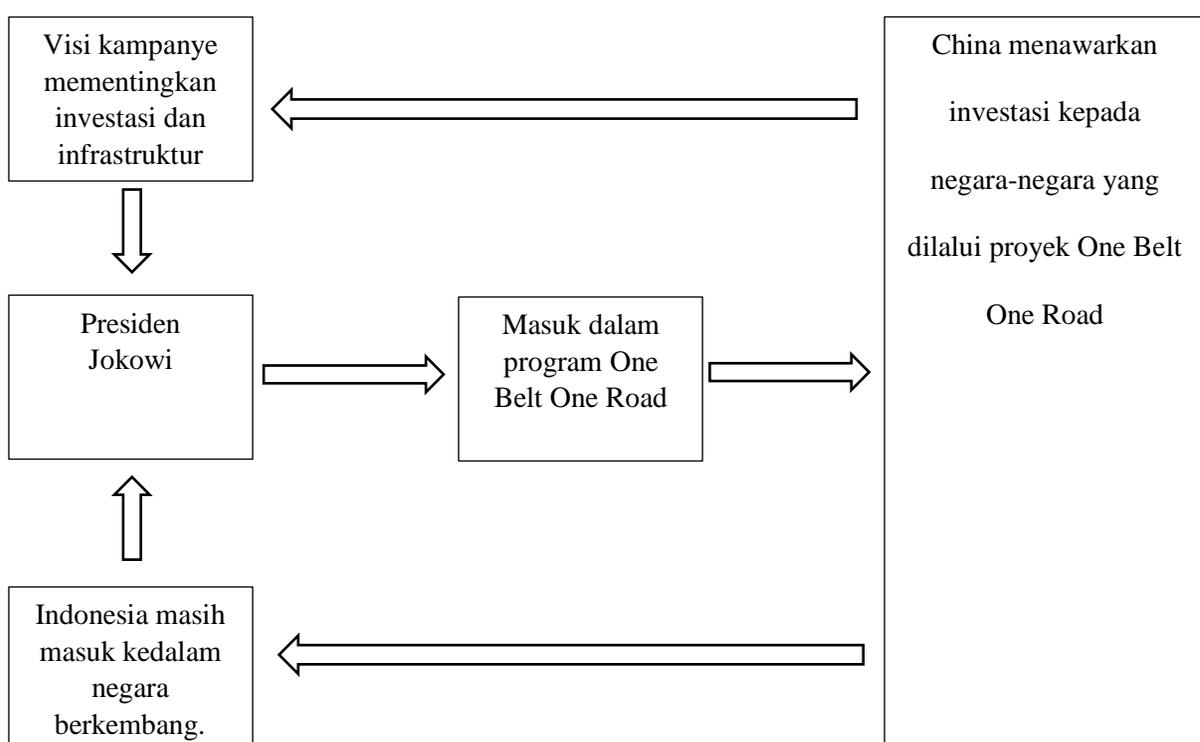
b. Kemampuan Ekonomi dan Militer

William D. Coplin menjelaskan, bahwa faktor ekonomi dan militer sebuah negara sangat berpengaruh dalam terciptanya sebuah kebijakan luar negeri, karena faktor ekonomi dan militer yaitu cerminan dari kemampuan sebuah negara dalam dunia internasional. Melihat kapabilitas ekonomi Indonesia, dengan bukti peningkatan GDP (Gross Domestic Product) atau PDB (Produk Domestik Bruto) yang masih fluktuatif,

dimana GDP ini digunakan sebagai indikator untuk menentukan kondisi ekonomi suatu negara. GDP Indonesia, menurut World Bank pada tahun 2018 berada pada US\$ 3.840, sedangkan menurut IMF (International Monetary Fund) sebesar US\$ 3.870. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, Indonesia masih tergolong dalam negara berkembang, karena menurut USTR (United States Trade Representative) menyebutkan bahwa untuk menjadi negara maju harus memiliki GDP minimal US\$ 12.375 (Jayani, 2020). Maka, dapat dikatakan bahwa Indonesia membutuhkan Cina agar dapat membantu untuk meningkatkan GDP.

c. Konteks Internasional

Konteks Internasional menurut Coplin, yaitu sebuah acuan untuk dapat menjelaskan suatu posisi atau perilaku dalam berhadapan dengan negara lain dalam panggung internasional. Konteks internasional disini yaitu, Cina sangat ambisius dalam membangun proyek One Belt One Road, karena terdapat 65 negara yang mencakup sebesar 70% populasi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Cina menawarkan investasi menjanjikan kepada negara-negara yang akan dilalui proyek One Belt One Road, untuk dapat dimanfaatkan untuk membangun negara-negara yang dilalui jalur sutra tersebut. Maka secara garis besar, bahwa Indonesia dan Cina sama-sama terhubung untuk dapat memenuhi kepentingan nasional negara masing-masing, maka dari itu Indonesia saat ini memiliki arah kerja sama yang lebih condong terhadap Cina (Mustofa, 2019).



Persepsi, merupakan hal terpenting untuk mengetahui bagaimana pandangan sebuah negara untuk dapat menganalisa dalam berhubungan dengan negara lain. Menurut Walter S. Jones, persepsi dapat tersusun ketika terdapat tiga komponen utama yaitu nilai, keyakinan, dan pengetahuan. Dari ketiga komponen tersebut, dapat membentuk suatu persepsi dalam skala individu, kelompok maupun negara (Jones, 1992).

Membahas lebih dalam mengenai persepsi, menurut Robert Jervis mengatakan bahwa persepsi adalah:

“has factors that lead involved in perceptions are beliefs, images and intentions... Perception involves a process of inference in which actors develop understandings (beliefs) about other actors (images) and what the others will do in given circumstances (intentions). Intentions are the actions that observers expects the actor will take under given circumstances” (Jervis, 1976)

Dari pemaparan Robert Jervis di atas, jelas bahwa persepsi merupakan sebuah proses untuk meraih cara pandang, melalui pengembangan pemahaman (Belief), melalui aktor-aktor lain (Image), kemudian apa yang dilakukan seorang aktor dalam keadaan tertentu (Intentions) untuk mengambil tindakan dalam negara.

Untuk memahami lebih lanjut, **belief** didefinisikan sebagai pandangan suatu negara dalam mengembangkan suatu pemahaman yang dapat dipercaya oleh negara lain. **Image** adalah sesuatu yang nampak dari tindakan yang dilakukan oleh suatu negara. Sedangkan **intentions** adalah sebuah prediksi suatu negara, terhadap tindakan yang akan diambil oleh negara lain pada situasi tertentu (Jervis, 1976).

Ketika melihat penjelasan dari Robert Jervis, maka **belief** dalam konteks kerja sama OBOR, bahwa Cina percaya proyek ini merupakan kerja sama yang baik untuk membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran, untuk dapat meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan ekonomi antarnegara Asia. Kemudian Image, merupakan hal yang terlihat untuk membuktikan yaitu Cina bersedia memberikan pinjaman sebesar US\$150 miliar pertahun, untuk para anggota *One Belt One Road*. Lalu dalam hal **intentions**, Indonesia memiliki kepentingan nasional untuk membangun infrastruktur dalam negeri. Dalam kaitan ini, Indonesia memandang OBOR tersebut

sebagai kesempatan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam negeri (Sebayang, 2019).

4. Hipotesa

Indonesia memutuskan untuk bergabung di dalam megaproyek OBOR Cina didasarkan pada alasan-alasan berikut ini:

1. Terdapat kepentingan di bidang politik dimana Indonesia berkeinginan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
2. Indonesia memiliki perspektif bahwa China memiliki kekuatan ekonomi yang besar, sehingga bergabung dalam megaproyek OBOR akan sangat menguntungkan karena prosedurnya yang mudah, dll.

5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan, dengan tujuan untuk dapat menjelaskan dan mengetahui kepentingan yang akan dicapai oleh Indonesia dengan melakukan kerja sama dengan China. Selain itu, penelitian ini merupakan sebagai bahan bacaan studi ilmu hubungan internasional, mengenai kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Cina dalam program One Belt One Road.

6. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, berfokus pada hubungan kerja sama yang dijalin Indonesia dengan china. Fokus hubungan kerja sama Indonesia dengan Cina dalam kurun waktu 2015 hingga 2021, hanya mencakup pada One Belt One Road, yang merupakan proyek ambisius Cina.

7. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini, dimaksudkan untuk agar mengetahui dan dapat menjelaskan maksud dari kepentingan nasional Indonesia dalam kerja sama proyek One Belt One Road. Batasan penelitian dalam skripsi ini, berfokus pada kerja sama Indonesia dan Cina dalam proyek ambisius Cina yaitu One Belt One Road. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan library research, yang mana sumberdata digunakan, berasal dari

buku, jurnal, internet, dokumen, dan artikel. Untuk dapat menganalisa secara benar, maka penulis menggunakan teknis analisis data yang bersifat kualitatif juga.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, disusun dan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Pertama, pendahuluan yang berisi berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, teori/konsep yang digunakan dalam penelitian ini, dan hipotesa

Selanjutnya, pada Bab Kedua, penulis akan memaparkan prinsip dan praksis politik luar negeri Indonesia yang melandasi sikap dan perilaku Indonesia dalam memenuhi kepentingan nasionalnya dalam konteks hubungan antarbangsa. Bab ini akan diakhiri dengan penjelasan mengenai kepentingan politik Indonesia di bawah Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam negeri

Kemudian, pada Bab Ketiga, penulis akan menjelaskan persepsi nasional Indonesia terhadap OBOR. Bab ini akan dimulai dengan pemaparan mengenai OBOR. Bab ini akan diakhiri dengan pembuktian bahwa Indonesia memiliki perspektif bahwa bergabungnya ke dalam megaproyek OBOR akan sangat menguntungkan karena prosedurnya yang mudah, dll.

Terakhir, pada Bab Keempat, penulis akan merangkai kesimpulan dari temuan yang ada dalam pembahasan.